

Mendobrak Jebakan Budaya Politik

Rockmini Soedjono

Pengamat Politik dan Anggota Komisi Nasional
Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Dibandingkan dengan wanita di negara-negara lain, peran wanita Indonesia umumnya yang bergiat di bidang ekonomi dan lainnya tampak jauh lebih maju. Tetapi wanita Indonesia masih terjebak pada budaya politik yang tak memungkinkannya berperan penuh di dalam kehidupan politik. Ironinya, para wanita tidak menyadari hal demikian. Mereka, pada tahun 1945-1950, bersama-sama pejuang pria bertekad menegakkan republik. Namun, dalam mengisi kemerdekaan, wanita terlihat belum bisa memberi warna. Mereka pun, kecuali para aktivis muda, cenderung menghindari "wilayah-wilayah rawan." Hadir semacam kegamangan di antara wanita yang sudah mempunyai posisi tertentu.

Dalam hal posisi di tingkat pemerintahan, wanita memang maju dan nampak diberi kesempatan. Peran orsospol dan, dalam hal ini, Kowani (Kongres Wanita Indonesia) sangat strategis dalam memperjuangkan posisi-posisi tersebut. Meskipun mengalami kemajuan pesat di satu sisi, tetapi, di sisi lain, keberanian untuk mendobrak *status quo* bidang politik nampak dihindari. Wilayah-wilayah politik yang memang penuh resiko, tampaknya amat sangat diperhitungkan. Kita mengharapkan wanita-wanita yang duduk di DPR untuk lebih nyaring bersuara, tetapi kenyataannya sangat jarang terdengar. Sementara wanita yang tidak masuk dalam organisasi, atau lebih bebas seperti LSM, dalam konstelasi politik di Indonesia masih dan belum terdengar gaungnya.

Memang benar wanita mempunyai posisi strategis dalam kehidupan keluarga dan bangsa. Wanita maju maka bangsa akan maju. Tetapi semua harus kontekstual dan jangan

berpikir hanya untuk memasuki wilayah wanita. Wanita Indonesia tahu budaya politik yang sekarang sedang berjalan. Budaya politik yang tidak menguntungkan proses demokratisasi. Tetapi tidak ada keberanian untuk memperbaiki atau mengubahnya. Saya berharap ada wanita yang berbicara dan berpikir dalam wilayah-wilayah bagaimana memperbaiki budaya politik supaya tidak feodalistis, supaya tidak seperti budaya kerajaan, supaya kondusif bagi proses demokratisasi. Sayangnya, gerak wanita yang berkecimpung dalam kehidupan politik sudah dibatasi dan dipolakan.

Wanita selama ini justru mementingkan masalah perannya. Karena terjebak pada rutinitas urusan wanita, menjadikannya kurang mampu melihat wawasan lebih luas, padahal banyak hal yang sebenarnya harus segera ditangani. Masalah-masalah mendasar seperti feodalisme, korupsi, kolusi, monopoli, kemunafikan, budaya politik, dan lain-lain malah tidak dijangkau. Kita menangani wanita-wanita Indonesia yang menjadi korban kekerasan di dalam negeri, tetapi apakah kita juga memikirkan dan menangani nasib pekerja wanita Indonesia yang tersiksa, terpenjara, dan tersiasia di luar negeri. Ini pun tampak tidak terjangkau karena kita sudah sangat dalam dilibatkan urusan rutinitas meningkatkan kesejahteraan wanita. Bagi saya, anggapan bahwa persoalan-persoalan wanita harus didahulukan kemudian menggarap persoalan lain sangatlah tidak tepat. Janganlah kita berpikir terkotak-kotak membedakan lelaki-perempuan. Pasti kegamangan akan hilang lebih cepat bila semua wanita berpikiran maju dan berorientasi kebutuhan kalangan bawah, tidak hanya terkotak khusus membahas wanita.



Roekmini Soedjono

Budaya politik sekarang diwarnai oleh feodalisme dan wanita terjebak di dalam. Padahal budaya politik merupakan sistem nilai relatif terstruktur yang diikuti oleh banyak orang dan bisa mempengaruhi sikap serta perilaku kehidupan politik. Budaya politik sangat cair. Otomatis akan berubah bila kita tidak mendukung sistem nilai. Untuk keluar dari budaya politik semacam itu memang dibutuhkan pencerahan dari elite politik. Gemanya pasti nyaring terdengar bila, misalnya, Kowani menyelenggarakan sebuah seminar yang menuntut dihilangkannya feodalisme. Atau anggota-anggota DPR yang mempertanyakan serta menuntut untuk meninjau kembali film-film kekerasan di televisi yang sangat berdampak pada dunia keseharian. Menjangkau kondisi lebih umum pasti membuat pihak pengambil keputusan politik berpikir keras bagaimana mengakomodasikan tuntutan demikian.

Bapak Wahono pernah mengatakan bahwa kita sudah terjebak pada kemunafikan. Untuk memapankan diri, semua orang yang tidak ingin terganggu atau takut dengan resiko terpaksa menyesuaikan pada kemunafikan. Ini bukan lagi persoalan sopan santun, tetapi kemunafikan yang bertentangan dengan hati nurani. Saya menginginkan sikap dan perilaku wanita sesuai

dengan hati nuraninya. Bila hati nurani kita jemih dan bersih, pasti sesuai dan sama dengan hati nurani bangsa serta rakyat secara keseluruhan. Tetapi semua orang, termasuk banyak wanita, tanpa disadari terjebak pada kepentingan-kepentingan sesaat karena harus menyesuaikan dengan budaya politik yang berlaku. Wanita yang mempunyai posisi sangat strategis seharusnya menyadari kondisi yang tidak sehat dan peka dengan penderitaan rakyat kecil serta bagaimana mencairkannya.

Saya mengharapkan wanita mempunyai daya dobrak seperti, misalnya, Raden Ajeng Kartini. Walaupun berasal dari lapisan tertentu, dia mampu mendobrak keadaan yang tidak benar. Sejak semula

Kartini sadar, meskipun dia tidak mengetahui apa yang dilakukannya merupakan wujud dari kesadaran politik, dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan pada tingkat Parlemen di Negeri Belanda. Suara yang digemakannya mempengaruhi pemerintah Kerajaan Belanda, sehingga terjadi proses perubahan politik dengan keluarnya, misalnya, kebijakan Politik Etis. Tetapi proses pengambilan keputusan yang berlangsung sekarang hanya mempengaruhi wilayah wanita, bukan pada bidang yang lebih luas.

Wanita dalam ABRI

Kesempatan yang diperoleh wanita di lingkungan sipil jauh lebih bagus daripada wanita di lingkungan ABRI. Contohnya, dilihat dari segi sekolah, wanita lingkungan ABRI yang hendak masuk Lemhannas harus dari Sesko ABRI. Tetapi wanita sipil yang berasal dari lingkungan Sespa akan diterima Lemhannas. Justeru tidak satupun wanita dari lingkungan ABRI yang bisa memasuki Lemhannas karena aturan-aturannya yang sangat ketat.

Wanita anggota ABRI tidak pernah bisa terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Fungsi pertahanan keamanan ABRI memang mempersiapkan wanita hanya bersifat

mendukung. Karena itu wanita yang bisa naik ke jenjang perwira tinggi justeru yang berada dalam fungsi sospol atau berkecimpung di lingkungan kamtibmas dan wilayah yang tidak langsung mendukung fungsi Hankam. Perwira-perwira tinggi wanita untuk angkatan-angkatan lain, di luar kepolisian, masih langka dan sulit. Perbedaan antara wanita-pria dalam ABRI memang disadari sudah sejak awal. Sebenarnya untuk ke jenjang pangkat tertinggi dalam ABRI bisa diraih wanita, tetapi sayangnya pangkat mereka dinaikkan ketika akan memasuki pensiun.

Walaupun konstitusi tidak membedakan pria atau wanita, tetapi kenyataannya kehidupan masyarakat masih dipengaruhi kultur dan tradisi. Ibu-ibu generasi sebelumnya hanya ikut suami dan jarang yang bekerja di luar rumah. Generasi wanita sekarang sudah diberi kesempatan sekolah setinggi-tingginya dan bebas bekerja di manapun. Tetapi pengaruh tradisi masih tetap ada. Misalnya, dua orang calon, wanita dan pria, diajukan untuk mengisi jabatan kepala biro. Yang pria biasanya dipilih untuk menduduki posisi itu meskipun kondisinya di bawah calon yang wanita.

Saya pernah menduduki jabatan kepala di tingkat Polwil. Pimpinan melihat saya mampu melaksanakan tugas itu dan ia pun tahu kemampuan saya yang melampaui batas-batas pria-wanita. Tetapi pimpinan yang lebih tinggi mempersoalkan kenapa mesti seorang wanita yang diberi jabatan. Bahkan saat serah terima jabatan, calon anak buah saya banyak yang protes dan tidak mau hadir dengan alasan kenapa perempuan yang memimpin mereka. Memang masih ada ketidakpercayaan dan untuk tiga bulan pertama saya harus mengalahkannya dan menghancurkan manusia laki-laki yang mempunyai pikiran kuno. Setelah itu mereka lebih terbuka. Jadi, pemikiran-pemikiran tradisional semacam itu masih ada dan sangat menghambat. Namun saya percaya pemikiran demikian akan hilang

dengan sendirinya pada generasi mendatang.

Pertanyaan yang jarang ditanyakan adalah mengenai bagaimana posisi seorang wanita ABRI yang berpangkat lebih tinggi dari suaminya yang juga berdinasi di ABRI? Pertanyaan ini sebenarnya telah memasuki wilayah yang jarang diketahui. Seorang Polwan, yang bersuami berpangkat lebih rendah, pernah menemui dan menangis dihadapan saya karena diharuskan keluar dari kepolisian. Saya memperjuangkan sampai ke Mabes Polri supaya dia tetap berdinasi, tetapi tetap tidak bisa. Memang ada aturan bahwa suami harus berpangkat lebih tinggi daripada isteri. Saya mengatakan kepada Polwan itu bahwa berjuang tidak perlu selalu di lingkungan Polri. Akhirnya dia melanjutkan sekolah dan kini telah menjadi seorang sarjana dengan wawasan yang jauh lebih luas. Contoh kedua, yang sering terjadi, pasangan suami-isteri yang sama-sama berpangkat Kolonel. Pimpinan memutuskan untuk mempromosikan sang suami. Isterinya dipanggil dan diberi nasehat supaya berhenti, pensiun, atau tidak aktif untuk memberi kesempatan kepada suami untuk maju. Padahal, Kolonel

perempuan itu jauh lebih cerdas dan maju bila diberi kesempatan daripada si suami.

Pemimpin Nasional

Selama ini saya tidak melihat adanya gerakan wanita, termasuk LSM, yang mampu menembus wilayah-wilayah rawan. Wilayah yang digarap sejauh ini masih pada masalah atau wilayah perempuan. Memang harus diakui kita membutuhkan orang atau organisasi yang memperjuangkan masalah perempuan, tetapi yang saya maksud adalah wanita yang justeru mempunyai peran strategis kenapa tidak mau memanfaatkan posisinya untuk memperbaiki keadaan.

Saya tidak sepakat dengan pernyataan bahwa wanita harus terwakili sekian persen

Saya berharap ada wanita yang berbicara dan berpikir dalam wilayah-wilayah bagaimana memperbaiki budaya politik supaya tidak feodalistis, supaya tidak seperti budaya kerajaan, supaya kondusif bagi proses demokratisasi.

dalam DPR. Mengapa? Misalnya, satu orosopol di daerah pemilihan tertentu mempunyai 30 wanita dan 30 pria sebagai calon anggota DPR. Setelah diadakan ranking ternyata seluruh calon pria berkualitas dan hanya 3 wanita yang berkualitas. Sedangkan daerah pemilihan itu harus mengambil 30 orang, baik wanita atau laki-laki. Karena harus memasukkan 5 wanita, maka diambil 2 wanita kurang berkualitas menyingkirkan laki-laki yang sebetulnya lebih berkualitas. Rakyat juga yang akhirnya dimanipulasi oleh wakilnya yang kurang berkualitas hanya karena pendekatan kuantitas.

Idealnya faktor kualitas dan kuantitas berjalan seiring. Sekarang yang diperjuangkan organisasi wanita masih lebih banyak segi kuantitas, meskipun perlahan-lahan mulai memperbaiki kualitas. Coba saja tengok *statement* Menteri Negara Urusan Peranan Wanita bahwa wanita belum waktunya menjadi pemimpin nasional. Pernyataan itu sebenarnya mengkondisikan jangan sampai seorang wanita dari partai politik yang "naik." Upaya alternatif harus dipotong dengan mengatakan belum saatnya tampil seorang presiden wanita. Saya yakin Menteri Negara UPW pasti tidak berani membuat pernyataan seperti itu bila tahu calon presiden alternatif adalah, misalnya, Mbak Tutut. Tidak semua orang, termasuk wanita, yang mempunyai posisi di atas mampu mengamati pertarungan elite politik secara detail.

Indonesia semakin membaik bila dipimpin oleh seorang yang berkualitas, terserah apakah wanita atau pria. Semua harus dikembalikan atas dasar kualitas. Saya sendiri belum melihat ada wanita yang cukup berkualitas untuk menjadi presiden. Kedewasaan, di samping kualitas, dalam kehidupan politik sangatlah penting. Beberapa wanita, mengambil contoh dari luar, yang saya anggap berkualitas adalah Margareth Thatcher, Golda Meir, dan Benazir Bhutto. Sejak dini mereka sudah dididik dan dipersiapkan menjadi pemimpin masa depan. Negara-negara lain memang masih memiliki banyak kelemahan, ditambah faktor emosional mengedepankan wanita yang terkadang belum tentu berkualitas. Sangat sulit wanita Indonesia menjadi pemimpin nasional di masa depan

bila budaya politik seperti sekarang tetap bertahan.

Pendekatan Sistem

Saya selalu menggunakan pendekatan sistem berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Semua pihak, terutama aparat birokrasi dan ABRI sebagai pelaksana sistem, harus mampu mengakomodasikan tuntutan zaman. Bila tidak, maka timbul frustrasi yang meluas dan mungkin berakibat pada lahirnya agresivitas, apatisme, menjadi Golput, atau segelintir yang inovatif. Masalah keadilan yang tertangani sejak awal tentu tidak akan memunculkan ketidakpuasan kelompok atau bahkan ketidakpuasan daerah dan wilayah.

Elite politik, dalam kaitan dengan pendekatan sistem, sangat menentukan pola bekerjanya sistem. Mengakomodasikan, mengabaikan, atau menekan tuntutan merupakan tanggapan-tanggapan yang dapat dilakukan. Bila tuntutan demokratisasi terus diabaikan, karena hendak mempertahankan *status quo* atau kepentingan-kepentingan sesaat, maka yang terjadi adalah semakin meluasnya frustrasi. Buatlah sistem mempunyai daya kemampuan. Tetapi reaksi elite politik dan pelaksana sistem selama ini terhadap, misalnya, Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) atau Komite Nasional Pemantauan Pemilu (KNPP) sudah setengah menekan. Dilihat dari segi politik, hal-hal yang selama ini telah dilakukan malah semakin tidak menyelesaikan masalah.

Demokratisasi dapat diperjuangkan secara damai, tidak perlu dengan konflik. Karena itu sejak semula saya mengatakan harus melalui pencerahan dengan memasukkan nilai-nilai demokrasi pada elite politik atau menyadarkan mereka akan kelemahan-kelemahan yang ada. Banyak yang berkecimpung pada pengambilan keputusan politik, tetapi tidak menyadari keputusan-keputusan yang ditelurkan mengandung kelemahan karena masih mengabaikan dan menekan tuntutan publik. Masalahnya dia terkungkung faktor budaya politik tadi.

Tidak hanya undang-undang yang mempengaruhi format politik, tetapi juga budaya politik. Budaya politik merupakan sistem nilai

yang mempengaruhi sikap dan perilaku. Budaya politik memiliki pula instrumen-instrumen yang saling mempengaruhi. Dalam pendekatan sistem terlihat instrumental input mulai dari Pancasila dan UUD 1945, hingga undang-undang politik, peraturan-peraturan, unsur manusia, faktor lingkungan, budaya politik, dan lain-lain sehingga terbentuk format politik. Format politik yang sedang berjalan tanpa disadari malah memperlemah sistem. Bila ingin menjaga sistem politik berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 tidak bisa tidak harus memperkuatnya dengan membuat sistem yang berkemampuan mengakomodasi tuntutan zaman.

Kenyataannya, orang berbicara demokratisasi dan jujur-adil lantas dianggap berdosa dan dituduh liberal serta memakai konsep Barat. Tuduhan ini seakan-akan melupakan bahwa Pancasila memuat nilai-nilai yang bersifat universal dan melampaui konsep Barat atau non-Barat. Jurdil merupakan nilai yang universal dan otomatis pengamalan keadilan sosial Pancasila. Jujur dan adil adalah konstitusional. Sayangnya, mungkin jebakan kepentingan sesaat demi organisasi-kelompok-politik tertentu, kebenaran yang selalu disuarakan malah dikatakan inkonstitusional. Jebakan pada kepentingan sesaat itu, misalnya politik perizinan yang dimanipulasi sedemikian rupa sehingga aparat kepolisian yang semula telah memberi izin lantas membatalkannya sendiri karena "mendapat" titipan-titipan politis. Berbicara pendekatan sistem berarti harus mengamankan sistem secara nasional dengan memperkuat atau mengakomodasikan secara terus-menerus tuntutan masyarakat. Jadi, Pemilihan Umum janganlah dipakai untuk melegitimasi kekuasaan.

Saya tidak mengatakan bahwa sekarang ini masih ada yang belum beradab. Tetapi yang ingin saya katakan adalah sosialisasi politik di Indonesia tidak berjalan. Sosialisasi

politik merupakan fungsi input dalam pendekatan sistem. Merupakan tugas orsospol, ormas, atau mereka yang berada di infrastruktur untuk melakukan sosialisasi politik. Rekrutment politik tempatnya juga di situ. Tetapi sekarang semuanya, yang tidak disadari oleh mereka, dialihkan. Politik *no*, ekonomi *yes*, pembangunan *yes*. Padahal yang harus kita perjuangkan adalah politik pembangunan. Pembangunan amat sangat membutuhkan politik pembangunan. Berbicara pembangunan sebagai pengamalan Pancasila, tidak hanya di bidang ekonomi tetapi juga di bidang politik, sosial, dan budaya. Dari situ bisa dilihat apakah pasal 1 sampai 33 UUD 1945 operasional atau tidak. Seluruh rakyat yang harus melakukannya, bukan hanya pemerintah.

Bangsa Indonesia pandai membuat konsep, tetapi terkadang sulit melaksanakannya. Bila ingin memperbaiki format politik harus juga memperbaiki dan mencairkan budaya politik yang menghalangi jalannya demokratisasi dan kedaulatan rakyat. Penafsiran tunggal selama ini adalah pemerintah dan mengklaim sebagai pembina politik. Seharusnya yang benar adalah

pembina sistem politik. Semua sub-sistem di dalam sistem kenegaraan harus sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Sebagai pembina politik bukan lantas intervensi seenaknya sehingga komponen-komponen yang ada tidak bisa melakukan sesuai dengan aturan-aturan mereka sendiri. Sebagai pembina politik yang berfungsi seharusnya tidak boleh ada "imbangan-imbangan." Pemerintah melihat komponen-komponen yang ada, misalnya dalam tubuh satu orsospol, apakah sudah sesuai dengan aturan-aturan main di dalam tubuh orsospol itu. Bila aturannya belum sesuai, serahkan kepada komponen itu untuk memperbaikinya. Mereka yang bermain di luar komponen itulah yang seharusnya *dikepras*. ●

Walaupun konstitusi tidak membedakan pria atau wanita, tetapi kenyataannya kehidupan masyarakat masih dipengaruhi kultur dan tradisi. Ibu-ibu generasi sebelumnya hanya ikut suami dan jarang yang bekerja di luar rumah.